

BAB II

HUBUNGAN TRILATERAL AUSTRALIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

2.1 Kebangkitan Amerika Serikat dan Atensi Australia di Dalamnya

Australia dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang cukup erat, berkaca pada latar belakang yang menjadi dasar relasi mereka sampai pada waktu penelitian ini dibuat. Amerika Serikat merupakan negara yang paling mempengaruhi proses pembentukan Australia sebagai negara, dengan pengaruh tersebut, Australia mengikuti jejak Amerika Serikat sebagai negara liberal (Albinski et al., 1985). Selain itu, salah satu pemicu pertama ialah bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Australia pada pertempuran Laut Karang (*Coral Sea*) pada tahun 1942. Amerika Serikat dengan kekuatan militernya memberi gambaran kepada Australia, bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang *powerful*.

Didukung dengan kemenangan atas Uni Soviet, Amerika Serikat mengklaim posisi tinggi dalam kekuatan. Pasca Perang Dunia II Amerika Serikat tidak hanya mendominasi dalam aspek kemiliteran, namun juga dengan aspek ekonomi. Dengan posisinya, Amerika Serikat membantu Australia untuk pulih dari Perang Dunia II, dimana Amerika Serikat membentuk sistem ekonomi *Bretton Woods Systems* yang mengilhami terbentuknya Lembaga-lembaga ekonomi seperti World Trade Organization (WTO), Bank Dunia, dan International Monetary Fund (IMF) (Hussein, 2013). Selain itu, Amerika Serikat juga membentuk *Marshall Plan* yang memberikan bantuan dana “*Grants in Aid*” pada negara-negara Eropa untuk membangkitkan ekonomi negaranya. Australia dengan melihat bantuan ekonomi

tersebut, tentu memiliki bahan bakar untuk membangun kembali perekonomiannya, berkaca pada konsekuensi yang dihadapi setiap negara setelah Perang Dunia II. Australia dalam sejarahnya, sudah terbiasa bersandar pada “*powerful friends*”. Konsekuensi dari Perang Dunia II untuk Australia dapat dilihat bahwa Amerika Serikat menjadi sandarannya dalam aspek pertahanan dan ekonomi, yang kemudian menjadi awal dari kerjasama-kerjasama yang akan terbentuk dikemudian hari.

2.1.1 Australia-New Zealand and United States Security Treaty

(ANZUS Treaty)

Berkaca pada sejarahnya, Australia merupakan bagian dari kerajaan Inggris, begitu juga dengan Selandia Baru. Pada Perang Dunia II, Inggris ikut terlibat didalamnya, yang secara otomatis, semua negara yang merupakan bagian darinya juga ikut serta terlibat didalamnya. Secara geografis kedua negara tersebut terletak dalam lokasi geografis yang terisolasi, yang kemudian mengakibatkan timbulnya ancaman serangan dari lawan.

Pada Perang Dunia II, Jepang melakukan ekspansinya ke area laut Pasifik, yang kemudian berdampak pada kedua negara tersebut. Melihat bahwa Inggris juga mencari sekutu, berkaca dari dibentuknya North Atlantic Treaty pada tahun 1949, Australia didorong untuk mencari keamanannya sendiri. Pada awalnya, Amerika Serikat tidak terlalu menganggap penting keamanan di kawasan Pasifik dengan berbagai alasan mendasar. Pertama, kawasan laut Pasifik lebih besar dibandingkan dengan kawasan Atlantik utara lainnya, selain itu negara-negara yang ada di kawasan ini memiliki lebih banyak budaya dan bahasa yang beragam. Kedua, situasi yang sedang dihadapi oleh kawasan Eropa menjadi fokus Amerika Serikat, dimana pada

masa tersebut, sedang berlangsungnya konflik di Jerman Barat dan Berlin Barat yang dilihat oleh Amerika Serikat sebagai ancaman dari Uni Soviet.

Pada tahun 1949, kemenangan komunis dalam revolusi Tiongkok memicu dan mempertegas apa yang menjadi ketakutan dari Amerika Serikat, yaitu penyebaran dan tendensi pengaruh oleh komunis di daerah Asia Pasifik. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan ideologi liberal yang tidak setuju dengan negara yang memiliki ideologi komunis, dimana dapat dilihat dengan bantuan yang diberikan kepada negara yang sedang berkonflik dengan Uni Soviet. Tiongkok dengan ideologinya yang sama dengan Uni Soviet tentu mulai menjadi perhatian dari Amerika Serikat, khususnya dengan terjadinya revolusi Tiongkok. Amerika Serikat akan melakukan upaya yang besar dan tegas pada negara dengan ideologi yang berlawanan dari padanya.

Pada tahun 1951 Amerika Serikat menyetujui dan meratifikasi kerjasama pertahanan dengan Australia dan Selandia Baru dalam bentuk Anzus Treaty. Dalam perjalanan waktu, Anzus Treaty tetap melekat dengan ketiga negara tersebut, namun dengan eksistensi Amerika Serikat sebagai negara adikuasa pada kala itu, Australia mendapatkan cukup banyak keuntungan dari kerjasama tersebut. Secara eksplisit, kerjasama pertahanan tersebut lebih dikuatkan kembali dengan dibentuknya SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) pada tanggal 8 september 1954 di Manila. SEATO dengan beranggotakan Amerika Serikat, Australia, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, dan Thailand dibentuk dengan dasar yang selaras dengan dibentuknya ANZUS Treaty.

Kedua kerjasama pertahanan tersebut dibentuk dengan dasar untuk menjaga kawasan Asia Tenggara dari pengaruh komunis yang pada masa itu mulai menunjukkan eksistensinya dengan berbagai macam upaya mereka. Secara umum, ANZUS Treaty memang dibentuk sebagai kerjasama pertahanan, namun yang perlu diketahui ialah kerjasama pertahanan tidak hanya berfokus pada serangan fisik seperti perang ataupun tindakan agresi dari suatu negara, namun juga serangan dalam bentuk pengaruh ideologi. Pada tahun 2001, Australia untuk pertama kalinya dipanggil melalui ANZUS untuk membantu menangani kasus yang lebih dikenal sebagai 9/11 di Amerika Serikat. Pada kasus tersebut, Amerika Serikat menyerukan bahwa kejadian yang mengerikan tersebut merupakan bagian dari kegiatan teroris.

2.1.2 Australia-United States Ministerial Consultation (AUSMIN)

Semenjak terbentuknya ANZUS Treaty, Australia dan Amerika Serikat membangun hubungan yang lebih intens dalam aspek pertahanan dan keamanan. Selain dari pada itu, Amerika Serikat juga diyakini memiliki peran yang besar dari berdirinya sebagaimana Australia sekarang. Pada dasarnya, AUSMIN merupakan sebuah forum konsultasi yang dibentuk secara resmi, dimana didalamnya, Amerika Serikat dan Australia mengadakan pertemuan resmi tiap tahunnya. Sesuai dengan namanya, forum ini diadakan sebagai ruang konsultasi resmi yang membahas banyak hal yang menjadi kepentingan kedua negara tersebut.

Secara historis, AUSMIN terbentuk pada tahun 1985 ketika Selandia Baru menolak kehadiran kapal selam nuklir Amerika Serikat di pelabuhannya. Akibat dari penolakan tersebut, Amerika Serikat melakukan penangguhan atas komitmennya dalam ANZUS Treaty, secara khusus kepada Selandia Baru.

Mengikuti kejadian tersebut, berbeda dengan yang dihadapi oleh Selandia Baru, Australia semakin dekat dengan Amerika Serikat. AUSMIN hadir sebagai angin segar bagi Australia yang mencari pertahanan keamanan di dunia internasional, dimana aliansi pertahanan-keamanan Australia dan Amerika Serikat semakin kuat yang menghasilkan beberapa kerjasama pertahanan-keamanan seperti *Sydney Statement* pada tahun 1996, *the Memorandum of Understanding on Ballistic Missile Defense* pada tahun 2004, *the Space Situational Awareness Partnership* pada tahun 2010, dan *US Force Posture Agreement* pada tahun 2014 (Hawkins, n.d.).

Pada tahun 1996 melalui Sydney Statement, Australia dan Amerika Serikat membawa tajuk Australia-United States: *A Strategic Partnership For The Twenty-First Century*, yang secara garis besar menyatakan deklarasi keamanan bersama (Australia-United States Ministerial Consultations 1996 Sydney Statement | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.). Dalam pertemuan AUSMIN yang ke-10 tersebut, dapat disimpulkan apa yang menjadi gambaran umum mengenai kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara tersebut, dengan tujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan keamanan kawasan. 4 (empat) poin yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut ialah:

1. Mempromosikan demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemakmuran, serta strategi untuk stabilitas;
2. Mencegah penggunaan paksaan dalam konflik internasional;
3. Mencegah proliferasi senjata pemusnah massal;
4. Mendorong kerjasama untuk meningkatkan keamanan kawasan secara keseluruhan.

Secara umum, Amerika Serikat menggandeng Australia dalam kebijakan keamanan kawasan di Asia Pasifik, dimana sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang dari berdirinya ANZUS Treaty, yaitu penyebaran pengaruh oleh negara yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Amerika Serikat dan juga Australia. AUSMIN hadir sebagai media yang meghubungkan serta mengeratkan hubungan yang dijalin oleh Amerika Serikat dan Australia, pada tahun 2007 Amerika Serikat dan Australia mempelopori dibentuknya Quadrilateral Security Dialogue (QSD) ataupun sering disebut QUAD yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India.

Melalui perjalanan waktu, tujuan utama dari berdirinya AUSMIN masih berdiri tegak hingga pada waktu penelitian ini dibuat. Berkaca pada perhelatan AUSMIN pada tanggal 6 Desember 2022, di Washington, D.C. Dijelaskan dalam reportase di laman resmi Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government, perdamaian dan kemakmuran kawasan masih menjadi tujuan utama mereka. 4 (empat) poin yang dibentuk pada tahun 1996 masih menjadi dasar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh kedua negara tersebut. Mereka meyakini dan menegaskan bahwa setiap negara dapat melakukan haknya dan mendapatkan kebebasan yang konsisten. Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai cerminan dari apa yang terjadi di laut Tiongkok Selatan, dimana konflik tersebut bertentangan langsung dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Berkaca dari tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat dalam AUSMIN mengancam tindakan tersebut dan memutuskan untuk

berkerjasama dengan aliansinya dalam mendukung keamanan kawasan maritim dan menegakkan hukum internasional.

Pada perhelatan AUSMIN 2022, terdapat banyak pembahasan meliputi keamanan regional, kerjasama regional, pembangunan ekonomi serta tidak lepas dari wabah yang menyerang dunia selama kurang lebih 3 tahun. Kedua negara tersebut menaruh banyak perhatian pada negara-negara yang berada di Pasifik, terutama perihal keamanan. Australia dan Amerika Serikat melalui U.S. Peace Corps dan Australian Volunteers Program akan meningkatkan dan memperluas kerjasama mereka. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang penting, maka dari itu, mereka siap sebagai penyokong dalam berbagai hal seperti ekonomi, iklim, infrastruktur energi, dan prioritas kerjasama keamanan.

2.1.3 Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA)

Negara tidak bisa berjalan hanya dengan mementingkan pertahanannya, ada aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu ekonomi. Sesuai apa yang dijelaskan diawal pembahasan, secara historis Amerika Serikat memiliki peran yang besar terhadap Australia, peran tersebut dapat dilihat dari bantuan dan kerjasama pertahanan-keamanan, tumbuhnya ideologi liberal pada Australia serta bantuan ekonomi seperti Marshall Plan yang memberikan suntikan dana untuk negara-negara yang sedang melakukan pemulihan pasca Perang Dunia II.

Seiring berjalannya waktu, kerjasama ekonomi antara Australia dan Amerika Serikat juga berjalan selaras dengan hubungan kedua negara yang semakin erat, namun tidak sebesar fokus kedua negara tersebut dalam aspek pertahanan dan

keamanan. Berkaca pada tahun 1991, Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada masa itu, George H. W. Bush melakukan penawaran kepada Selandia Baru dan Australia untuk memulai kegiatan perdagangan bebas bersama. Namun, pada tahun 1991, Australia dibawah pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating yang merupakan bagian dari partai buruh, menolak ajakan tersebut.

Pada tahun 2004, Australia dibawah pemerintahan Perdana Menteri John Howard membawa kerjasama ekonomi Australia dan Amerika Serikat menemui babak baru, dimana pada tanggal 18 Mei 2004, Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA) ditandatangani oleh Amerika Serikat dan 13 Agustus 2004 oleh Australia yang kemudian mulai dijalankan pada 1 Januari 2005. Proses pembentukan kerjasama ini tidak sebentar, proses komunikasi dimulai pada tahun 2001 ketika George W. Bush terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Secara umum, ketentuan yang diatur didalam perjanjian ini mencakup banyak sektor ekonomi yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan dikedua negara, khususnya untuk Australia. Secara sederhana, AUSFTA dapat dirangkum dalam 9 poin yang membahas mengenai ketentuan kerjasama, yaitu:

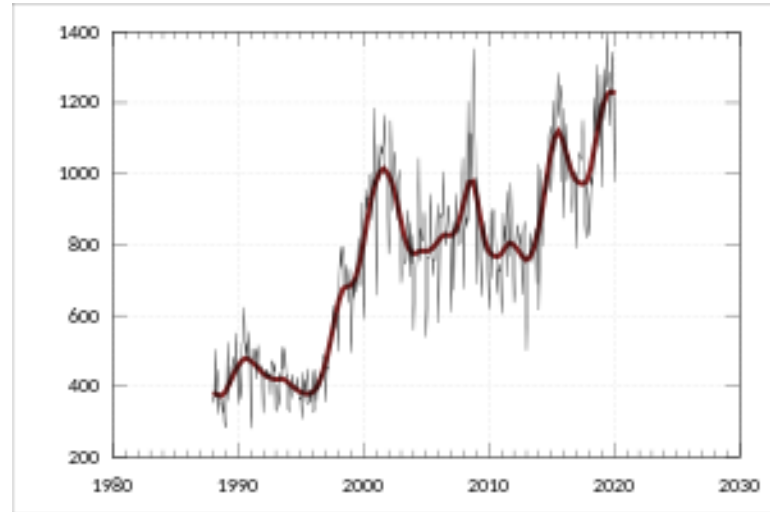
1. Pembentukan dan pendefinisian kawasan perdagangan bebas,
2. Respon nasional dan akses pasar akan barang,
3. Skema dari manfaat farmasi; tindakan sanitasi dan fitosanitari
4. Tekstil dan pakaian siap pakai,
5. Telekomunikasi; perdagangan elektronik
6. Layanan keuangan; investasi, transparansi
7. Pengadaan pemerintah; perdagangan pemerintah

8. Agrikultur: daging sapi, produk susu, tembakau, kapas, kacang-kacangan, dan alpukat
9. Aturan asal; hak kekayaan intelektual; administrasi kepabeanan; pengamanan; batasan teknis dalam perdagangan; perdagangan lintas batas dalam jasa; buruh; lingkungan; hal-hal yang berhubungan dengan persaingan

Salah satu faktor pendorong dari pada kerjasama AUSFTA ini ialah inisiatif dari Amerika Serikat yang walaupun pada awalnya ditolak oleh pemimpin terdahulu Howard. Selain itu, kerjasama ini didukung penuh oleh pemerintahan Howard karena mereka melihat kerjasama ini dapat membantu menaikkan perekonomian Australia yang juga akan memperat hubungan Australia dan Amerika Serikat.

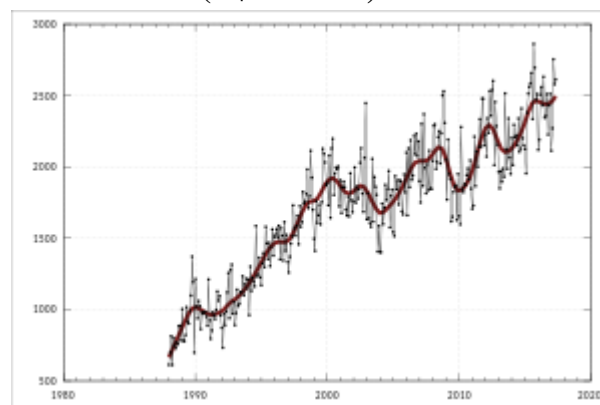
Dalam perjalanan waktu, dampak dari AUSFTA mulai menunjukkan hasil bagi kedua negara tersebut. Pada dasarnya, bentuk kerjasama Free Trade Agreement merupakan kerjasama bilateral yang bertujuan untuk memudahkan proses perdagangan antar kedua negara, mulai dari pengurangan hingga peniadaan bea, hingga prosedural yang dipersingkat. Berikut merupakan grafik ekspor dari Australia-Amerika Serikat dan Amerika Serikat-Australia.

Grafik 2.1 Monthly value of Australia merchandise exports to the United States (A\$ millions) in 1988-2022



Sumber: (Australian Bureau of Statistics, 2023)

Grafik 2.2 Monthly value of United States merchandise exports to the Australia (A\$ millions) in 1988-2022



Source: (Australian Bureau of Statistics, 2023)

Melalui data yang disediakan oleh Australian Bureau of Statistics, dari tahun 1988 hingga tahun 2022 kedua negara mengalami tingkat ekspor yang naik walaupun cenderung fluktuatif. Namun jika diperhatikan, data statistik untuk besaran jumlah ekspor yang dilakukan oleh Australia tidak berbanding sama

dengan besaran jumlah yang Amerika Serikat ekspor (Australian Bureau of Statistics, 2023).

Dalam penjelasannya, Australian Department of Foreign Affairs and Trade menjelaskan bahwa ketidakseimbangan perdagangan antara Australia dan Amerika Serikat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti nilai tukar kurs antar kedua negara tersebut yang mempengaruhi perilaku aktor ekonomi di kedua negara tersebut. Pada tahun 2007, Amerika Serikat merupakan eksportir terbesar untuk Australia dalam perdagangan barang dan jasa yang mencapai 31 miliar dolar Australia. Sedangkan di waktu yang bersamaan, total nilai ekspor Australia ke Amerika Serikat hanya mencapai setengah dari besaran tersebut, yaitu 15 miliar dolar Australia. Melihat pergerakan perdagangan antara kedua negara tersebut setelah dibentuknya FTA (Free Trade Agreement), para pemerhati ekonomi internasional meragukan adanya keuntungan yang signifikan bagi Australia.

2.1.4 Australia-United Kingdom-United States (AUKUS)

Pada tanggal 3 maret 2021, pertemuan pertama Quadrilateral Security Dialogue yang dihadiri oleh setiap pemimpin negara yang tergabung dalam QUAD diadakan secara daring (Studies, 2021). Keempat negara yang tergabung dalam QUAD tersebut membahas mengenai ancaman yang dibawa oleh Tiongkok dalam kebijakan-kebijakannya selaras dengan fase '*rising up china*'. Selain membahas ancaman tersebut, mereka juga membahas mengenai penyebaran serta peningkatan kesehatan internasional, luar angkasa, energi, teknologi, dan nilai-nilai demokrat. Seiring berjalannya waktu, tidak jauh dari dilakukannya kegiatan pertemuan QUAD, pada tanggal 15 September 2021, AUKUS terbentuk yang terdiri dari

Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebuah pakta pertahanan yang terdiri dari 3 (tiga) negara yang merupakan bagian dari five eyes, merupakan negara yang menegaskan mengenai posisi mereka terhadap Tiongkok.

Pada hari terbentuknya AUKUS, Amerika Serikat dan Inggris memberikan pernyataan bahwa mereka akan mendukung penuh Australia dalam pengembangan dan kepemilikan akan kapal selam nuklir serta pengerahan tenaga militer ke kawasan pasifik (Studies, 2021). Secara umum beberapa kesepakatan dari ketiga negara tersebut ialah:

1. Kecerdasan buatan
2. Perang dunia maya
3. Kemampuan bawah air
4. Kemampuan serangan jarak jauh
5. Pertahanan nuklir

Berdasarkan dari gambaran umum kesepakatan antara ketiga negara tersebut, AUKUS memiliki peran yang berbeda dari five eyes yang memiliki peran intelijen. Five eyes sendiri merupakan aliansi antara 5 (lima) negara yang terdiri dari Inggris, Australi, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Dalam pembentukan AUKUS, mayoritas negara di dunia internasional mengecam kebijakan tersebut sebagai kebijakan pemicu api. Pembentukan pakta AUKUS memiliki tujuan yang cukup jelas untuk dipahami oleh negara-negara, dengan fokus pada kawasan pasifik khususnya Indo-Pasifik, beberapa pengamat mengatakan bahwa aliansi tersebut dibentuk dengan tujuan menghadapi Tiongkok. Kegiatan pertama yang dibawa oleh AUKUS adalah pelatihan kepada pelaut serta teknisi

Australia perihal teknologi nuklir dan kapal selam yang kemudian akan diikuti dengan rotasi pengiriman kapal selam Amerika Serikat dan Inggris di Australia. Pada tahun 2030, Australia direncanakan akan membeli setidaknya 3 (tiga) kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat (Ordoñez, 2023).

Dalam pembentukannya, beberapa negara menganggap bahwa aliansi ini bersifat positif dengan alasan akan membawa keseimbangan, sedangkan beberapa negara lainnya berpendapat netral, seperti Korea Selatan yang berharap tidak adanya tensi yang berlebihan dari dibentuknya AUKUS (Brooke-Holland et al., 2021). Tiongkok disisi lain menganggap bahwa aliansi tersebut merusak perdamaian dan stabilitas regional. Zhao Lijian, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan bahwa aliansi tersebut telah mengintensifkan perlombaan senjata dan merusak hubungan internasional dalam upaya non-proliferasi.

2.2 Dinamika Hubungan Australia dan Tiongkok

Jika melihat sekilas di dalam peta, Australia berada cukup jauh dari kawasan ASIA. Secara geografis Australia sendiri merupakan bagian dari Benua Oseania. Berangkat dari latar belakang tersebut, para akademisi kerap menjuluki Australia dengan istilah *strange neighbours* (Ball & Wilson, 1991). Perbedaan geografis tentu berdampak pada budaya, bahasa serta latar belakang terbentuknya suatu negara. Australia dengan latar belakangnya sebagai salah satu negara koloni Inggris yang kemudian mengadaptasi ideologi Amerika Serikat memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari melihat kepentingan serta tujuan mereka pada dunia internasional.

Australia dengan kapabilitasnya, memiliki intensitas untuk menjadi salah satu negara yang menjadi sandaran bagi negara-negara disekitarnya. Terlepas dari

hubungannya dengan negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika Serikat, Australia menganggap bahwa memiliki rekan “besar” dalam dunia internasional merupakan hal yang penting. Melalui sejarahnya, Australia selalu tertarik untuk memiliki hubungan yang special dengan negara-negara yang memiliki keunggulan dalam satu ataupun lebih aspek. Berkaca pada hal tersebut, Tiongkok yang mengalami batu loncatan dalam perekonomian menarik perhatian Australia. Sebelum kebangkitan Tiongkok, Amerika Serikat merupakan rekan dagang terbesar Australia, berkaca dalam pembentukan AUSFTA pada tahun 2004. Australia melihat kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat melalui AUSFTA tidak berdampak secara signifikan seperti yang mereka ekspektasikan, dimana AUSFTA lebih menguntungkan Amerika Serikat. Dengan melihat hasil dari kerjasama tersebut serta melihat langsung perkembangan Tiongkok, Australia memiliki rencana dalam menambah “*its great and powerful friends*”.

Hubungan antara Australia dan Tiongkok bermula ketika Tiongkok yang masih dalam konflik, diakui keberadaannya oleh Australia. Semenjak diakui keberadaannya sebagai negara, terlepas dari konflik yang terjadi didalamnya, Australia mendukung Tiongkok dalam prosesnya untuk masuk dalam Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), yang kemudian pada tahun 1945, Tiongkok dapat bergabung dalam PBB. Mengikuti kejadian tersebut, pada tahun 1949, revolusi Tiongkok terjadi yang dimana komunis mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Melalui gambaran historis antara Australia dan Tiongkok, kedua negara tersebut memiliki hubungan dinamis yang dapat digambarkan sebagai hubungan pasang-surut. Mulai dari pendekatan awal melalui dukungan Australia terhadap

Tiongkok untuk berdiri sebagai negara yang dianggap sebagai ‘pasang’, hingga keadaan ‘surut’ ketika Australia sedang melakukan pemulihan pasca PD II yang memilih untuk berfokus penuh pada Amerika Serikat dengan alasan bantuan dana yang diterima. Pada saat itu, Australia juga menyuarakan keprihatinannya atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Tiongkok. Dalam keberhasilan Australia untuk pulih dari PD II, ia melebarkan kembali jangkauan kerjasamanya, pada tahun 1990-an, Australia dan Tiongkok membangun kerjasama ekonomi yang cukup intens, dimana Tiongkok menjadi salah satu rekan dagang terbesar Australia, begitu juga dengan Australia yang menjadi salah satu pemasok sumber daya serta jasa yang penting bagi Tiongkok.

Melalui penjelasan sebelumnya, mengenai hubungan pasang-surut antara Australia dan Tiongkok terus terjadi, seperti pada tahun 2010, dimana Australia sebagai negara yang meyakini akan posisinya di Asia-Pasifik, menyuarakan keprihatinannya dalam tindakan klaim sepihak oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang secara internasional juga menjadi perhatian negara-negara. Australia membawa UNCLOS atas tanggapannya terhadap tindakan klaim sepihak Tiongkok. Selain itu, Australia juga menyatakan keberatannya terhadap dugaan akan campur tangannya Tiongkok dalam politik nasional Australia. Terlepas dari pasang-surut hubungan kedua negara tersebut, kerjasama ekonomi seakan memiliki jalur khusus yang membuatnya terus berjalan.

2.2.1 Joint Ministerial Economic Commission (JMEC)

Melalui gambaran umum hubungan kerjasama antara Australia dan Tiongkok, kedua negara mengembangkan hubungan diplomasinya dengan komprehensif

melalui kerjasama dagang. Berkaca pada kerjasama jangka panjang yang stabil serta pertumbuhan yang signifikan bagi kedua negara dapat ditelusuri sejak terbentuknya hubungan yang baik antar kedua negara, khususnya pada tahun 1972, yang merupakan awal mula dikenalnya Republik Rakyat Tiongkok.

Pada tahun 1973, Australia dan Tiongkok membentuk Trade Agreement Between the Government of Australia and the Government of the People's Republic of China, yang merupakan menjadi dasar dari kerjasama serta hubungan dagang dari kedua negara tersebut. Pada tahun 1986, 16 tahun terpaut dari dibentuknya dasar kerjasama antara Australia dan Tiongkok, dibentuk sebuah forum komunikasi antar kedua negara tersebut, dengan tujuan memperkuat relasi. Joint Ministerial Economic Commission (JMEC) diadakan pertama kali pada tahun 1986, hingga mencapai pertemuannya yang ke-15 pada tanggal 15 September 2017 menghasilkan pertumbuhan signifikan secara dua arah dalam perdagangan sebesar 155 miliar dolar Australia pada tahun 2016 (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2017).

Dalam keberjalanannya, JMEC menghasilkan cukup banyak produk kerjasama seperti Joint Statement dan Strategic Economic Dialogue (SED) yang secara keseluruhan merupakan upaya kedua negara untuk membangun hubungan dagang yang lebih besar dari sebelumnya. Kedua negara dalam JMEC juga mengakui bahwa perluasan cakupan kerjasama seperti kerjasama multilateral juga merupakan suatu hal yang krusial, maka dari itu kedua negara juga mendukung ASIA-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO). Selain itu JMEC secara khusus membahas mengenai keseimbangan

keuntungan yang didapatkan satu dengan yang lainnya, dalam implementasinya, kerjasama bilateral dalam aspek ekonomi harus menguntungkan kedua belah pihak secara adil. Dalam pembentukan dasar kerjasama ekonomi, Australia dan Tiongkok merangkum kerjasama dalam beberapa sektor seperti:

1. Energi dan pertambangan
2. Tekstil, pakaian, dan alas kaki
3. Agrikultur dan inspeksi karantina
4. Investasi; Pengembangan wilayah sentral dan barat Tiongkok
5. Teknologi informasi dan komunikasi serta perdagangan elektronik
6. Kerjasama kepabeanan
7. Batasan teknis dalam dagang; keamanan masyarakat; keamanan makanan; hak kekayaan intelektual; anti-dumping
8. Jasa; visa kerja dan bisnis
9. Konsultasi industri
10. Kontrol ekspor dan kerjasama dengan AG (Australia Group)

Dalam 10 poin yang terdiri dari 16 pasal yang mengatur dan membahas secara komprehensif kerjasama ekonomi kedua negara tersebut, Australia dan Tiongkok berharap akan terus mengembangkan ekonomi negara mereka melalui kerjasama bilateral tersebut. Dalam pertemuan ke-6 Joint Statement Australia-Tiongkok pada tanggal 21 Desember 2022, kedua negara sepakat untuk mempertahankan keterlibatan (*high-level engagement*) dan memperbaiki dan memulai ulang dialog terlepas dari isu apapun (Embassy of the People's Republic of China, 2022). Beberapa fokus mereka ialah:

1. Hubungan bilateral
2. Isu dagang dan ekonomi
3. Urusan konsuler
4. Perubahan iklim
5. Pertahanan
6. Isu regional dan internasional

2.2.2 China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA)

Melalui penjelasan sebelumnya, Australia dan Tiongkok selalu menemui cara untuk mempererat hubungan kedua negara tersebut dalam sektor ekonomi. Sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh duta besar Tiongkok, bahwa kedua negara akan terus mempertahankan keterlibatan tingkat tinggi (*high-level engagement*), memperbaiki dan memulai ulang dialog terlepas dari isu apapun.

Dalam hubungan yang dinamis, Australia dan Tiongkok banyak membentuk kerjasama serta forum yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berlandaskan dari pengalaman tersebut, Australia dan Tiongkok kembali membentuk kerjasama ekonomi yang kembali berfokus untuk menaikkan kerjasama ekonomi kedua negara tersebut. ChAFTA sebagai bentuk kerjasama ekonomi Australia dan Tiongkok ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2015 dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2015. Namun, dalam pembentukannya tidak semudah yang dipikirkan, dimana awal pembentukan ChAFTA, sudah dilakukan dialog sejak tahun 2005, tahun yang sama ketika Australia dan Amerika Serikat membentuk AUSFTA. Proses dialog yang dilakukan sebanyak 21 kali ini akhirnya berbuah pada tahun 2015.

Kesulitan dalam pembentukan ChAFTA sendiri hadir tidak lain karena dasar kepercayaan atas Tiongkok, dimana masyarakat merasa bahwa ChAFTA akan membawa kerugian bagi pengusaha Australia, begitu juga dengan latar belakang Tiongkok yang pernah dituding melakukan pelanggaran HAM.

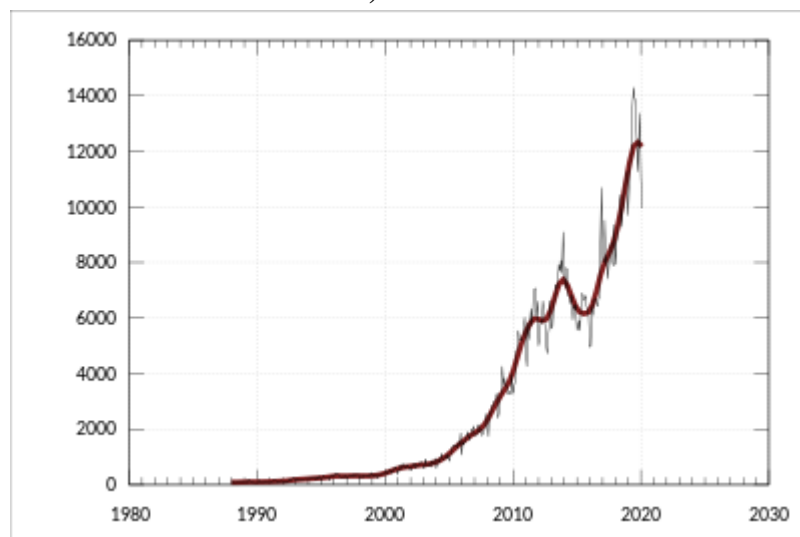
Dalam analisisnya, ChAFTA dianggap sebagai perjanjian yang paling progresif dalam bidang investasi dan liberalisasi perdagangan jika dibandingkan dengan perjanjian lainnya (Ministry of Commerce People's Republic of China, 2015). Selain itu, ChAFTA juga hadir sebagai perjanjian dengan hasil pencapaian tertinggi dalam bidang jasa untuk Australia. Secara umum, isi dari perjanjian dari ChAFTA tidak jauh dari dasar perjanjian yang sudah dibentuk sebelumnya yang berisikan 16 poin utama. Namun dalam perumusannya, ChAFTA merupakan pembaruan dari apa yang sudah ada, mengikuti perkembangan zaman, serta berfokus lebih pada investasi, liberalisasi ekonomi dan kepabeanan. Beberapa ketentuan yang ada didalam ChAFTA meliputi :

1. ChAFTA menghilangkan tarif yang ada pada kegiatan ekspor utama seperti emas, bijih besi, gas alam cair, dan minyak petroleum mentah
2. ChAFTA menghilangkan tarif yang ada pada kegiatan ekspor batubara kokas
3. ChAFTA menghilangkan tarif yang ada pada kegiatan ekspor batubara termal
4. ChAFTA menghilangkan tarif yang ada pada kegiatan ekspor produk manufaktur seperti suku cadang mobil, produk plastic, opal, dan batu mulia.

5. ChAFTA mengurangi tarif sebesar 10 persen pada kegiatan ekspor aluminium oksida, nikel serta tembaga, seng, aluminium, dan titanium oksida yang tidak ditempa
6. ChAFTA mengurangi tarif sebesar 10 persen pada kegiatan ekspor obat-obatan dan produk Kesehatan

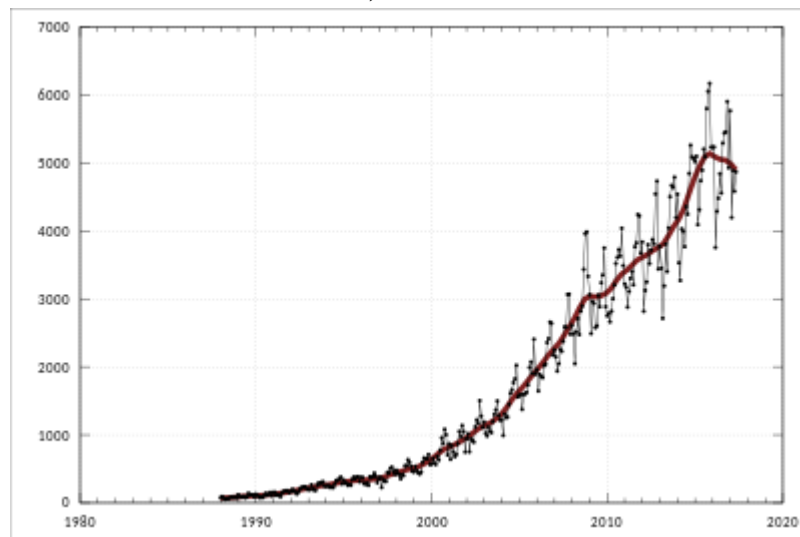
Tarif cukai diakui merupakan salah satu hambatan terbesar para pengusaha untuk menembus pasar internasional. Dalam implementasinya, setiap negara memberlakukan tarif cukai untuk proses ekspor dan impor, dengan jumlah yang tidak sedikit, membentuk kesadaran bahwa bersaing di pasar internasional bukanlah sebuah proses yang mudah.

Grafik 2. 3 Monthly value of Australia merchandise exports to China (A\$ millions) in 1988-2021



Sumber: (Australian Bureau of Statistics, 2023)

Grafik 2. 4 Monthly value of China merchandise exports to Australia (A\$ millions) in 1988-2021



Sumber: (Australian Bureau of Statistics, 2023)

Dalam pertumbuhannya, kegiatan kerjasama bilateral antara Australia dan Tiongkok dapat dikatakan sebagai kerjasama dua arah yang cukup baik, dimana kedua negara memiliki pertumbuhan yang signifikan secara bersamaan sejak dibentuknya ChAFTA. Kedua negara melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tidak jauh berbeda satu sama lain, dimana tingkat kegiatan ekspor dan impor melalui data grafik yang ditampilkan menunjukkan tingkat kerjasama dinamis yang adil. Dapat dilihat bahwa pada data grafik yang ditampilkan bahwa setelah tahun 2015, Australia meningkatkan ekspornya ke Tiongkok yang sebelumnya menurun cukup drastis. Maka dari itu, kedua negara mengaggap bahwa kerjasama ini memiliki hasil yang besar serta membawa kenaikan tingkat yang sama. Selain pengurangan dan penghapusan tarif cukai dalam kerjasama bilateral ChAFTA, proses in and out juga menjadi fokus kerjasama ini, maka dari itu beberapa beberapa

poin seperti inspeksi, kepabeanan, serta kesehatan dan keamanan menjadi bagian yang penting.

2.2.3 RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)

Australia dalam membangun hubungannya dengan Tiongkok dapat dilihat melalui keaktifannya dalam bidang ekonomi. Sebagaimana dengan perjanjian serta kerjasama sebelumnya, Australia akan berusaha hadir dalam setiap agenda ekonomi khususnya di kawasan Asia-Pasifik. RCEP (Regional Comprehensive Economic Agreement) merupakan perjanjian perdagangan bebas.

Dalam perancangannya, RCEP memiliki kesamaan dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya, perbedaannya ialah negara-negara yang terlibat di dalamnya. RCEP melibatkan sepuluh negara yang menjadi bagian dari ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) dan Mitranya. Sepuluh negara tersebut ialah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam serta Tiongkok, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan sebagai mitra (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.). RCEP pertama kali dibahas pada KTT ASEAN pada tahun 2011 yang diadakan di Bali, Indonesia. Pada pertemuan tersebut, direncanakan pembahasan dan pembentukan demi memberikan efektifitas yang tinggi. India yang merupakan bagian dari mitra RCEP memilih untuk mengundurkan diri, walaupun begitu, forum menyatakan bahwa India dipersilahkan untuk bergabung kembali pada perjanjian tersebut.

Pada tahun 2012, RCEP dibahas dalam agenda KTT ASEAN yang dilaksanakan di Kamboja, dan kemudian ditandatangani pada 15 November 2020

ketika KTT ASEAN dilaksanakan secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah. Dalam implementasinya, RCEP akan mulai dijalankan secara kontinu pada 1 Januari 2022 untuk sepuluh anggota ASEAN. Dalam pembentukannya, RCEP akan membawa poin-poin penting dalam perdagangan bebas seperti:

1. Perdagangan bebas yang melibatkan mitra negara-negara ASEAN dengan membawa nilai ekonomi modern
2. Penghapusan tarif bea untuk mayoritas barang dagang 92%
3. Penambahan akses pasar tertentu seperti bahan bakar mineral, olahan makanan dan minuman, plastik serta produk kimia lainnya
4. Prosedur kepabeanan yang disederhanakan
5. Peningkatan FTA ASEAN Plus One
6. Pemberian jaminan keamanan dan kenyamanan pada investor
7. Pengembangan fokus pada perdagangan elektronik, kebijakan persaingan dan hak kekayaan intelektual sesuai dengan tuntutan zaman.

RCEP melalui pembahasannya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kesepuluh negara ASEAN yang bergabung, dimana keanggotaan perjanjian ini terdiri dari kumpulan negara dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kehadiran Tiongkok dan Australia terlihat sebagai kesempatan emas bagi kesepuluh anggota tersebut, dengan dasar kedua negara tersebut menampilkan kerjasama ekonomi yang memiliki dampak cukup besar bagi keduanya. Tiongkok dengan tingkat ekonomi paling besar diantara mitra lainnya mengambil alih dalam pembentukan aturan perdagangan bebas ini. RCEP dalam visi dan misinya akan terus giat mengembangkan hubungan kerjasama ekonomi yang terlihat dalam

kerangka alur waktu 20 tahun kedepan. Dengan kerangka alur waktu yang cukup lama, dapat dikatakan bahwa Tiongkok akan memiliki dampak yang cukup besar pada kawasan Asia-Pasifik, begitu juga dengan Australia yang mencoba ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

2.3 Posisi Australia dalam Defence White Paper 2016 dan Foreign Policy White Paper 2017

Pada tahun 2016, Australia mengeluarkan *Defence White Paper* yang merangkum gambaran umum dari arah kebijakan luar negeri Australia yang berfokus pada pertahanan dan keamanan. beberapa tajuk yang menjadi poin penting dalam buku ini ialah Kawasan Indo-Pasifik, hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan antara Australia dan Amerika Serikat serta tanggapan dan respon Australia terhadap kebangkitan Tiongkok yang mempengaruhi stabilitas kawasannya. Selain itu dibahas juga mengenai keseriusan Australia dalam meningkatkan pertahanan dan keamanannya dalam aspek maritim dengan bukti perencanaan kenaikan anggaran belanja pertahanannya.

Mengikuti dari dirilisnya *Defence White Paper 2016*, Pemerintah Australia juga merilis buku yang berisikan mengenai fokus mereka terhadap hubungannya dengan dunia internasional. Pemerintah Australia merilis *Australia Foreign Policy White Paper 2017* yang merangkum gambaran umum dari arah kebijakan luar negeri Australia secara universal dan sekaligus terfokus. *Australia Foreign Policy White Paper 2017* menjabarkan pandangan kebijakan luar negeri Australia serta serta penetapan prioritas strategi Australia terhadap dunia internasional. Selain itu,

salah satu fungsi dari buku ini ialah sebagai alat navigasi dengan tujuan membentuk wilayahnya dalam beberapa tahun kedepan.

2.3.1 Defence White Paper 2016

Pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 16 september, pertemuan antara ketiga pihak yang mewakili negaranya masing-masing yaitu, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris membuahkan sebuah program kerjasama militer yang disebut AUKUS. Dasar dari dibentuknya AUKUS merupakan sudut pandang dari ketiga negara tersebut, dimana mereka merasa bahwa dinamika kawasan di Indo-Pasifik membuat mereka untuk meningkatkan kerjasama keamanan ke tingkat yang lebih tinggi (Marpaung, 2022).

Salah satu buah dari *Defence White Paper 2016* terealisasi pada tahun 2016 yang berbentuk kerjasama pertahanan dan keamanan antara ketiga negara tersebut. Secara umum, *Defence White Paper 2016*, Australia menekankan pada aspek keamanan maritim yang menjadi salah satu prioritasnya. didukung dengan dikerahkannya dana dengan estimasi yang hampir mencapai di angka 195 miliar dolar untuk memenuhi kebutuhan pertahanan yang berbentuk armada, peralatan serta latihan (Jennett, 2016).

Salah satu Implementasi dari *Defence White Paper 2016* ialah terbentuknya kerjasama AUKUS. Sesuai dengan penjelasan pada subbab sebelumnya, Australia Defence Force (ADF) akan meningkatkan kemampuan maritimnya yang dapat didukung dengan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir serta kapal patroli lepas pantai yang baru. Sebagai gambaran, terdapat fokus utama yang secara umum

dirangkum dalam *Defence White Paper 2016* yang membahas mengenai Amerika Serikat, Kawasan Indo-Pasifik, dan Tiongkok.

Fokus Australia dalam *Defence White Paper 2016* dengan subjek Amerika Serikat adalah Australia menyatakan posisi Amerika Serikat sebagai aliansi pertahanan dan keamanan merupakan sebuah aspek yang krusial. Pemerintah Australia melihat Amerika Serikat memiliki peran penting dalam aliansi keamanannya serta diperlukannya kelanjutan serta peningkatan kerjasama regional dalam aspek pertahanan dan keamanan.

Fokus Australia dalam *Defence White Paper 2016* dengan subjek Tiongkok adalah Pemerintah Australia mengakui akan kebangkitan Tiongkok. Namun Pemerintah Australia juga mengakui dan menyadari bahwa kebangkitan Tiongkok diiringi dengan agresivitas yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi dinamika kawasan serta kondisi Australia di kawasannya. Australia memandang bahwa tindakan agresif Tiongkok melemahkan tatanan liberal dalam norma dan aturan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Fokus Australia dalam *Defence White Paper 2016* dengan subjek Kawasan Indo-Pasifik adalah kondisi kawasan yang menuntut Australia untuk meletakkan fokus lebih terhadap peningkatan kekuatan maritimnya. Selain itu, Australia juga menyadari akan kepentingan keamanan dalam aspek keamanan siber dan ruang angkasa dalam menjamin keamanan Australia di kawasannya. Secara keseluruhan, buku ini mempertegas pentingnya Amerika Serikat, Tiongkok, dan Kawasan Indo-Pasifik dalam strategi pertahanannya, yang kemudian melalui dinamika yang

dipaparkan, Australia akan meningkatkan kemampuannya melalui aspek-aspek tersebut.

2.3.2 Foreign Policy White Paper 2017

Australia dengan letak geografisnya, sesuai dengan penjelasan di subbab sebelumnya, merupakan letak yang unik. Unik dalam konteks jika dimaksimalkan, akan memberikan peluang yang sangat baik dalam memenuhi potensinya. Pemerintah Australia didalam dokumen ini menyatakan bahwa dengan kondisi geografisnya, mereka bertujuan membuat Australia sebagai center of Indo-Pasifik.

Sebagai awalan, buku ini memberikan dua gambaran umum prioritas dari kebijakan luar negeri Australia, yang menyangkut aspek tatanan dunia berbasis aturan serta peningkatan perdagangan. Dalam menjalankan kebijakannya, Australia akan mengupayakan sifat inklusivitas didalamnya. Belajar dari kesalahan di masa lampau, Pemerintah Australia mengklaim bahwa penjabaran buku ini lebih dari alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintahan partai buruh pada tahun 2013. Selain itu, Australia juga menjabarkan mengenai fokus mereka kepada Amerika Serikat, Tiongkok, dan Kawasan Indo-Pasifik.

Melalui penjabaran yang ada di dalam *Australia Foreign Policy White Paper 2017*, dapat dirangkum mengenai poin-poin yang membahas ketiga subjek sebelumnya. Fokus Australia dalam *Foreign Policy White Paper 2017* dengan subjek Amerika Serikat adalah ketegasan Australia akan komitmennya dalam mempertahankan tatanan dunia berbasis aturan. Karena melalui gambaran umum awal, Australia menyatakan bahwa aturan dan norma internasional berdasar liberal yang dibawa Amerika Serikat merupakan hal yang benar. Didalam dokumen ini,

Australia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan tetap menjadi kekuatan utama di Indo-Pasifik. Pernyataan tersebut hadir berdasarkan pengamatan Australia bahwa jika tanpa keterlibatan Amerika Serikat, Australia akan kesulitan mencapai tingkat keamanan yang mereka inginkan.

Fokus Australia dalam *Foreign Policy White Paper 2017* dengan subjek Tiongkok adalah pengakuan Australia akan kebangkitan dan peningkatan Tiongkok khususnya di Kawasan Indo-Pasifik. Australia melalui pengamatannya menyatakan bahwa kekuatan dan pengaruh Tiongkok berjalan selaras dengan kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasifik. Selain dari pada itu, Australia juga menyampaikan pendapat tegasnya dalam fenomena klaim sepihak Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan. Terlepas dari semua pernyataan tersebut, sesuai dengan sadarnya Australia akan kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasannya, Australia memilih untuk mengembangkan kerjasama perdagangannya dengan Tiongkok. Dengan latar belakang kesuksesan kerjasama dagang antara Australia dan Tiongkok, keduanya bertekad untuk membangun perekonomian di kawasannya.

Fokus Australia dalam *Foreign Policy White Paper 2017* dengan subjek Kawasan Indo-Pasifik adalah kawasan tersebut akan jadi agenda utama dalam aspek wilayah. Australia akan menargetkan Kawasan Indo-Pasifik sebagai fokus utamanya dalam kebijakan luar negerinya. Dalam dokumen tersebut, Australia juga mendorong Kawasan Indo-Pasifik untuk mengedepankan kerjasama dengan dasar demokrasi, yang sejalan dengan ideologinya. Australia juga menyatakan mengenai pentingnya Kawasan Asia Tenggara bagi masa depannya, karena melalui

pendefinisian wilayah kawasan, Australia mengikutsertakan wilayah Asia Tenggara didalam Kawasan Indo-Pasifik.

2.4 Pengaruh Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok pada Australia

Australia dengan dasar letak geografis, tidak berada dalam benua ASIA, dengan dasar tersebut Australia menyadari bahwa negaranya merupakan negara barat yang berada di kawasan ASIA. Dalam implementasinya Australia cukup aktif dalam kawasan Indo-Pasifik, ASIA, dan Asia Tenggara, berkaca hubungan kerjasama yang dibentuk seperti APEC, SEATO, ASEAN-Australia Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dan hubungan bilateral dengan negara-negara di ASIA. Australia dengan kondisi geografis dan sejarah terbentuknya disebut sebagai *strange neighbours* (Ball & Wilson, 1991). Keaktifan Australia tentu memiliki dasar, selain memenuhi kepentingan nasionalnya, Australia sebagai negara barat yang menjadi kerabat dekat Amerika Serikat berambisi sebagai aktor utama dalam politik luar negeri Asia Pasifik.

Posisi strategis yang dimiliki oleh Australia melahirkan peran strategis dalam kawasannya, selain kerjasama yang baik dengan negara tetangganya, Australia juga memiliki hubungan baik dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang memiliki peran serta pengaruh besar di dunia internasional. Beberapa keuntungan yang besar tersebut membawa Australia pada posisinya yang sekarang. Namun dengan pemahaman bahwa dunia internasional merupakan dunia yang anarkis, dimana konflik serta segregasi akan menghampiri siapapun aktornya. Australia dengan "*it's great and powerful friends*" tidak selalu

berjalan sesuai apa yang mereka ekspektasikan. Australia kerap kali dihadapkan dengan dilema atas hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Hubungan Australia-Amerika Serikat tidak semulus hubungannya dengan Tiongkok, berkaca pada beberapa beberapa penangguhan kerjasama ekonomi yang Tiongkok lakukan terhadap Australia dengan dasar sikap Australia yang terlalu proaktif mendukung Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya yang menyudutkan Tiongkok. Salah contoh kasusnya ialah penangguhan kerjasama dagang karena keikutsertaan Australia dalam membangun tensi panas antara Tiongkok dan Amerika Serikat, Duta besar Tiongkok menegur Payne atas keputusannya dalam kebijakan luar negerinya yang tidak beralasan dan proaktif, yang kemudian akan membawa kerusakan bagi hubungan bilateral antar kedua negara tersebut

Terdapat beberapa unsur mengapa Australia memiliki keberanian dalam tetap berdiri dengan pendiriannya untuk tidak memilih Amerika Serikat ataupun Tiongkok secara terang-terangan. Mengingat akan jasa Amerika Serikat untuk Australia dimasa lampau serta posisi Amerika Serikat sebagai negara *powerful* yang memiliki kesamaan ideologi dengan Australia, kekhawatiran Australia akan Tiongkok tidak tumbuh sebesar negara-negara ASIA, dengan dasar bahwa Australia tidak bertetangga langsung dengan Tiongkok. Selain itu, tidak sama dengan negara-negara ASIA yang memiliki sejarah penemuan “oleh Tiongkok”. Australia juga tidak pernah menjadi subjek penaklukan dimasa dinasti yang diklaim oleh Tiongkok. Berkaca pada alasan-alasan tersebut, Australia terus berupaya

mempertahankan hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok dengan waktu yang bersamaan.

Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama memiliki kepentingan nasional, Amerika Serikat dengan historisnya sebagai stabilitator yang diakui oleh semua negara dan Tiongkok yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan dengan ambisi yang besar. Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki pengaruh yang besar tidak hanya untuk negara-negara disekitarnya namun juga untuk negara-negara di dunia. Kedua negara tersebut memiliki pandangan yang cukup berbeda dalam melakukan politik internasional. Terlepas dari perbedaan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut, Amerika Serikat dan Tiongkok berupaya membangun hubungan bilateral.